



RAPBN-P TAHUN ANGGARAN 2016

T. Ade Surya*)

Abstrak

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 (RAPBN-P 2016) telah secara resmi diajukan pemerintah ke DPR. Dalam pokok-pokok RAPBN-P 2016 tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro (asumsi makro) serta pemotongan atas pendapatan dan belanja negara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan pada beberapa indikator ekonomi makro. Namun demikian, pemerintah juga harus realistis dalam mengusulkan perubahan asumsi makro serta pendapatan dan belanja negara dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tersebut. Alasannya, perubahan postur APBN dapat memberikan dampak yang besar bagi pemerintah dalam mengelola sektor perekonomian nasional. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk terus mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target-target yang terdapat dalam APBN-P 2016.

Pendahuluan

Pada awal bulan ini, pemerintah telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk Tahun Anggaran 2016 (RAPBN-P 2016) ke DPR RI untuk dilakukan pembahasan bersama. Dalam pokok-pokok RAPBN-P 2016 tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan beberapa proyeksi asumsi dasar ekonomi makro (asumsi makro) yang meliputi nilai tukar rupiah, inflasi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price / ICP*), lifting minyak, dan lifting gas. Usulan perubahan beberapa proyeksi asumsi makro tersebut diajukan karena memperhatikan perkembangan ekonomi global dan perekonomian

domestik. Perkembangan ekonomi terkini menunjukkan bahwa situasi perekonomian global masih terjadi pelambatan dan cukup berisiko, khususnya terkait dengan pelambatan ekonomi yang dialami Tiongkok, normalisasi kebijakan *The Federal Reserve (The Fed)*, dan fluktuasi harga minyak mentah dunia. Sementara itu, kondisi perekonomian domestik juga tidak begitu baik karena turut terpengaruh dari pelambatan ekonomi global yang menyebabkan tingkat investasi dan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di samping perubahan proyeksi asumsi makro, dalam RAPBN-P 2016 pemerintah juga mengusulkan perubahan atas pendapatan dan belanja negara.

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: teuku.surya@dpr.go.id



Menyoroti usulan perubahan dalam RAPBN-P 2016 yang harus disesuaikan dengan perkembangan perekonomian terkini, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, A. Tony Prasetyantono, mengemukakan bahwa perekonomian tahun 2016 ini memang lebih sulit dari perkiraan semula. Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia masih dalam tren pelambatan pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya risiko suku bunga di Amerika Serikat (AS) yang akan naik, sektor riil yang lesu, permintaan kredit melemah, dan kredit macet yang meningkat. Risiko terbesar jika pertumbuhan ekonomi meleset di bawah target adalah melemahnya daya serap tenaga kerja yang tentunya memiliki *multiplier effect*. Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Jakarta, YB Suhartoko, yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini menghadapi sejumlah risiko. Dari sisi eksternal, rencana *The Fed*, menaikkan suku bunga memicu kembali ketidakpastian pada perekonomian global. Jika *The Fed* menaikkan suku bunga maka akan berdampak adanya aliran modal menuju ke AS, akibatnya rupiah akan melemah. Sedangkan dari sisi moneter domestik, keinginan pemerintah menurunkan suku bunga komersial di bawah 10 persen belum juga terealisasi sampai sekarang, sebab sisi suplai dan permintaan sama-sama menunggu.

Terkait dengan usulan perubahan dalam pokok-pokok RAPBN-P 2016, saat ini sedang dilakukan proses pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI melalui Komisi XI dan Badan Anggaran. Penulis tertarik untuk membahas mengenai perubahan asumsi makro dan dampak perubahan atas pendapatan dan belanja negara yang diajukan pemerintah dalam RAPBN-P 2016.

Perubahan Asumsi Makro dalam RAPBN-P 2016

Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan perubahan proyeksi asumsi makro, pemerintah harus melihat dan mempertimbangkan banyak faktor, yang antara lain meliputi kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, penguatan rupiah, harga minyak mentah dunia, serta kondisi

perekonomian secara global. Realitas yang ada sampai dengan pertengahan tahun 2016 ini, walaupun rupiah cenderung sedikit menguat tetapi faktor-faktor lainnya relatif masih buruk dan berisiko. Harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa hari terakhir mampu menembus angka US\$50 per barel masih sangat berpotensi untuk turun lagi. Nilai ekspor Indonesia periode Januari - April 2016 menurun sebesar 13,63 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, dan konsumsi rumah tangga yang walaupun pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar 4,94 persen tetapi belum kembali ke tren di atas 5 persen. Sementara untuk kondisi perekonomian global, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kondisinya masih belum pulih dari pelambatan dan memberikan dampak yang cukup terasa bagi perekonomian nasional.

Terkait dengan perubahan proyeksi asumsi makro, pemerintah mengemukakan bahwa menguatnya rupiah terhadap dolar AS dan fluktuasi harga minyak mentah dunia menjadi penyebab perubahan proyeksi inflasi yang sebelumnya berada di level 4,7 persen, berubah menjadi 4 persen pada RAPBN-P 2016. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah, karena adanya penguatan rupiah terhadap dolar AS, maka pemerintah memproyeksikan nilai tukar rupiah menjadi Rp13.500 per USD yang sebelumnya berada pada angka Rp13.900 per USD. Penguatan nilai tukar rupiah secara otomatis menyebabkan asumsi harga minyak mentah Indonesia berubah turun dan pemerintah memperkirakan berada pada kisaran rata-rata USD35 per barel. Untuk lifting minyak dan gas, pemerintah memproyeksikan hanya mencapai 810 ribu barel minyak dan 1.115 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah dari asumsi pada APBN 2016.

Sementara untuk target pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini, pemerintah tidak mengusulkan perubahan karena tetap yakin dapat mencapai target di angka 5,3 persen seperti yang ditetapkan dalam APBN 2016. Pertimbangannya antara lain karena investasi akan mulai meningkat dan konsumsi rumah tangga sebagai basis pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik pada tiga triwulan akhir sejalan dengan penyerapan belanja yang optimal, walaupun dalam triwulan pertama tahun 2016 ini pertumbuhan ekonomi nasional

Tabel 1. Perbandingan Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Asumsi Makro	APBN-P 2015	APBN 2016	RAPBN-P 2016
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,3	5,3
Inflasi (% <i>yoy</i>)	5,0	4,7	4,0
Suku Bunga SPN Tiga Bulan (%)	6,2	5,5	5,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	12.500,-	13.900,-	13.500,-
Harga Minyak Mentah (USD/barel)	60	50	35
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	825	830	810
Lifting Gas (MBOEPD)	1.221	1.155	1.115

Sumber: Nota Keuangan APBN-P 2015, APBN 2016, dan RAPBN-P 2016.

tercatat hanya sebesar 4,92 persen, meleset dari angka pertumbuhan yang diharapkan. Pertimbangan investasi akan segera meningkat karena mulai banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang berjalan. Sedangkan untuk peningkatan konsumsi rumah tangga antara lain karena didukung dengan adanya gaji ke-13 dan tunjangan hari raya yang akan segera cair di pertengahan tahun, serta komitmen pemerintah untuk menjaga laju inflasi. Namun angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen ini masih dianggap terlalu optimistis jika dibandingkan dengan perkiraan beberapa lembaga dunia. *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 berada pada angka 5,1 persen, sedangkan *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka yang lebih rendah, yaitu hanya mencapai 4,9 persen. Perbandingan asumsi makro dalam APBN-P 2015 dan APBN 2016 dengan usulan perubahan asumsi makro yang diajukan pemerintah pada RAPBN-P 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Poin penting dalam usulan perubahan proyeksi asumsi makro ini adalah pemerintah tidak boleh terlalu optimis maupun pesimis dalam menentukan asumsi makro. Ada 2 hal, *pertama*, jika pemerintah terlalu optimis maka potensi kegagalan untuk mencapai target asumsi makro menjadi besar. Padahal ketika pemerintah tidak mampu mencapai target asumsi makro tersebut akan muncul konsekuensi yang harus dihadapi, seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. *Kedua*, jika pemerintah terlalu pesimis maka kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah akan berkurang, karena pemerintah dianggap tidak mampu dan tidak mempunyai kapasitas mengelola sektor ekonomi.

Perubahan Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN-P 2016

Dalam pokok-pokok RAPBN-P 2016, pemerintah menurunkan target pendapatan negara sebesar Rp88 triliun, yaitu dari Rp1.822,5 triliun pada APBN 2016 menjadi Rp1.734,5 triliun pada RAPBN-P 2016. Pemerintah memotong target dari semua jenis pendapatan yang secara tradisional menjadi penyumbang terbesar. Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), targetnya dipotong Rp68,4 triliun, yaitu dari Rp273,8 triliun menjadi 205,4 triliun. PNBP sumber daya alam migas diturunkan Rp50,2 triliun sehingga menjadi Rp28,4 triliun. Sedangkan PNBP nonmigas diturunkan Rp24,4 triliun sehingga menjadi Rp21,8 triliun. Hal yang sama terjadi pada penerimaan perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), targetnya dipotong Rp97,5 triliun, yaitu dari Rp571,7 triliun menjadi Rp474,2 triliun. Target Pajak Penghasilan (PPh) migas dipotong Rp17,1 triliun, yaitu dari Rp41,4 triliun menjadi Rp24,3 triliun. Akan tetapi, pada saat yang sama pemerintah meningkatkan target PPh nonmigas senilai Rp103,7 triliun, yaitu dari Rp715,8 triliun menjadi Rp819,5 triliun. Menurut pemerintah, kenaikan PPh nonmigas didorong oleh uang tebusan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang asumsinya menyumbang Rp165 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga memotong anggaran belanja sebesar Rp47,9 triliun, yaitu dari Rp2095,7 triliun pada APBN 2016 menjadi Rp2.047,8 triliun pada RAPBN-P 2016. Target belanja pemerintah tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.289,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp758,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengajukan usulan perubahan target defisit anggaran yang semula Rp273,2 triliun atau 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Rp313,3 triliun atau 2,48 persen dari PDB.

Dalam usulan perubahan pendapatan dan belanja negara ini, yang perlu digarisbawahi adalah hampir semuanya sumber-sumber penerimaan mengalami pemotongan, kecuali untuk PPh nonmigas yang mengandalkan *tax amnesty*. Hal ini harus menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah, karena dengan melakukan pemotongan terhadap APBN, sebenarnya memberikan sinyal buruk kepada pasar dan investor. Kemudian pemerintah juga perlu berhati-hati agar tidak hanya mengandalkan *tax amnesty* dalam mencapai target penerimaan pajak, karena terkait kebijakan *tax amnesty* ini masih belum ada kejelasan dan asumsi pencapaiannya juga terlalu optimis. Selain itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengurangan belanja negara. Diharapkan belanja negara yang dikurangi oleh pemerintah adalah yang termasuk dalam belanja rutin, bukan belanja modal sebagai upaya efisiensi anggaran. Sehingga misi pemerintah untuk terus melakukan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana.

Penutup

Usulan perubahan postur anggaran dalam pokok-pokok RAPBN-P 2016 perlu dicermati lebih jauh terutama terkait perubahan proyeksi asumsi makro dan perubahan pendapatan dan belanja negara. Dalam menentukan asumsi makro, pemerintah diharapkan tidak terlalu optimis maupun pesimis, yang terpenting asumsi tersebut berdasarkan telaah terhadap perkembangan perekonomian terkini dan prediksi ke depan. Sementara untuk perubahan pendapatan dan belanja negara yang sebagian besar merupakan pemotongan, pemerintah diharapkan dapat mencapai target penerimaan agar defisit tidak melebar dan dapat melakukan efisiensi dalam pengurangan belanja negara.

Peran DPR RI sangat penting dalam menetapkan APBN-P 2016, terutama dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan memberikan persetujuan pada saat pembahasan RUU APBN-P 2016. Selanjutnya, DPR RI harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target-target yang terdapat dalam APBN-P 2016.

Referensi

- “APBN-P Pangkas Belanja Negara Rp 47 Triliun”, *Harian Ekonomi Neraca*, 6 Juni 2016.
- “BI: Laju Konsumsi Rumah Tangga Membaik di Triwulan II”, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/05/05/087768643/bi-laju-konsumsi-rumah-tangga-membaik-di-triwulan-ii>, diakses 12 Juni 2016.
- “Ini Revisi Asumsi Makro dalam RAPBN-P 2016”, <http://bisnis.liputan6.com/read/2477781/ini-revisi-asumsi-makro-dalam-rapbnp-2016>, diakses 9 Juni 2016.
- “Kebijakan Fiskal Agresif”, *Harian Ekonomi Neraca*, 7 Juni 2016.
- “Kinerja Ekspor Nasional April Turun 3,07%”, <http://surabaya.bisnis.com/read/20160516/8/88817/kinerja-ekspor-nasional-april-turun-307>, diakses 12 Juni 2016.
- “Pertumbuhan 5,1-5,2 Persen”, *Kompas*, 7 Juni 2016.
- “RAPBN-P 2016”, *Kompas*, 4 Juni 2016.
- “Target Pembangunan Diturunkan Lagi”, *Kompas*, 3 Juni 2016.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.